



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 162 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta mempedomani Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala daerah menyusun rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Sehubungan hal tersebut, Tema dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019- 2024, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pasca pandemi covid-19. Maka tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dalam menghadapi pemulihan dari bencana pandemic Covid-19 adalah **“Pemulihan ekonomi dan Reformasi struktural Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro”**.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, dan sebagai pedoman Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang menjadi dasar Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Substansi KUA/Perubahan KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, rancangan PPAS/Perubahan PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dokumen Perubahan PPAS memuat program prioritas dan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana amanat Pasal 171 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2022, tetap mengacu pada ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;

- b. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
- d. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
- e. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan
- f. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai panduan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran baik pada pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
2. Menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan daerah walaupun adanya perubahan anggaran.

1.3. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 31. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
 32. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

33. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1694);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.
43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 992);
49. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 /PMK.07 /2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus disease 2019 (Covid-19)* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
52. Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2022;
53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

61. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
62. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 44 Seri E); dan
63. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, terjadi perubahan asumsi KUA, yaitu terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah semula diproyeksikan sebesar Rp 17.239.885.634.209,00 berubah menjadi sebesar Rp 17.953.071.238.635,00 atau bertambah sebesar Rp 713.185.604.426,00 yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah semula sebesar Rp 14.236.045.643.080,00 menjadi sebesar Rp 14.986.045.643.080,00 atau bertambah sebesar Rp 750.000.000.000,00;
 - b. Retribusi Daerah semula sebesar Rp 101.388.665.700,00 menjadi sebesar Rp 93.914.509.300,00 atau berkurang sebesar Rp 7.474.156.400,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula sebesar Rp 443.834.479.270,00 menjadi sebesar Rp 441.684.821.030,00 atau berkurang sebesar Rp 2.149.658.240,00; dan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah semula sebesar Rp 2.458.616.846.159,00 menjadi sebesar Rp 2.431.426.265.225,00 atau berkurang sebesar Rp 27.190.580.934,00.
2. Pendapatan Transfer semula diproyeksikan sebesar Rp 10.385.484.651.000,00 berubah menjadi sebesar Rp 10.502.087.431.000,00 atau bertambah sebesar Rp 116.602.780.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp 2.458.737.838.000,00 menjadi sebesar Rp 2.575.340.618.000,00 atau bertambah sebesar Rp 116.602.780.000,00;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp 3.652.119.082.000,00;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap sebesar Rp 4.238.186.593.000,00; dan

- d. Dana Insentif Daerah tetap sebesar Rp 36.441.138.000,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp 16.804.606.602,00 berubah menjadi Rp 43.846.606.602,00 atau bertambah sebesar Rp 27.042.000.000,00 yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* tetap sebesar Rp 16.804.606.602,00;
 - b. Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja (Persero) pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 27.042.000.000,00.

Dengan demikian secara keseluruhan, target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan proyeksi yang semula sebesar Rp 27.642.174.891.811,00 berubah menjadi sebesar Rp 28.499.005.276.237,00 atau bertambah sebesar Rp 856.830.384.426,00.

Secara lebih rinci rencana Perubahan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.239.885.634.209	17.953.071.238.635	713.185.604.426
4.1.01	Pajak Daerah	14.236.045.643.080	14.986.045.643.080	750.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	101.388.665.700	93.914.509.300	(7.474.156.400)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	443.834.479.270	441.684.821.030	(2.149.658.240)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.458.616.846.159	2.431.426.265.225	(27.190.580.934)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	10.385.484.651.000	10.502.087.431.000	116.602.780.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.385.484.651.000	10.502.087.431.000	116.602.780.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.804.606.602	43.846.606.602	27.042.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.804.606.602	43.846.606.602	27.042.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	27.642.174.891.811	28.499.005.276.237	856.830.384.426
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.831.065.923.000	4.079.381.410.799	2.248.315.487.799
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.831.065.923.000	4.079.381.410.799	2.248.315.487.799
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.831.065.923.000	4.079.381.410.799	2.248.315.487.799
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	29.473.240.814.811	32.578.386.687.036	3.105.145.872.225

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Masing-Masing URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

3.1 Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Masing-Masing Urusan, SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja Daerah

Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara Perangkat Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase penempatan pencari kerja di perusahaan peserta JMF		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah pelayanan administrasi		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah persentase pembelian barang		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Nilai Pola Pangan Harapan Konsumsi		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Peningkatan Produk Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) Tersertifikasi/Terdaftar (%)		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Peningkatan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Tersertifikasi/Terdaftar		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase UKM yang telah diberdayakan		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Indeks kualitas pengembangan Iklim Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Nilai Komitmen/rencana Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indek kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase kontribusi perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi Investasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase data dan sistem informasi Penanamam Modal yang dapat di akses		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			persentase peningkatan pelestarian cagar budaya		
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW)		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase peningkatan cakupan pemasaran dalam negeri dan luar negeri		
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase peningkatan pemanfaatan dan perlindungan HAKI produk-produk kreatif		
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan indeks pertanaman		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Peningkatan produksi hortikultura		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentasi Peningkatan Benih Bersertifikat		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium		
				DINAS PETERNAKAN	
			Persentase peningkatan status kesehatan hewan		
				DINAS PETERNAKAN	
			Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH		
				DINAS PETERNAKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase indikator program yang tercapai di UPT Tahura Raden Soerjo		
				DINAS KEHUTANAN	
			Persentase realisasi anggaran di UPT Tahura Raden Soerjo		
				DINAS KEHUTANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase luas areal rehaibitasi		
				DINAS KEHUTANAN	
			persentase luas areal rehabilitasi		
				DINAS KEHUTANAN	
			Persentase luas areal rehabilitasi		
				DINAS KEHUTANAN	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Prosentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Sumenep		
				DINAS KEHUTANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Jumlah Ijin yang diterbitkan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Tingkat Inflasi Bahan Makanan		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Net Ekspor Non Migas		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Penunjang (rutin)		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase indikator program yang tercapai outcome		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Pembangunan Urusan Perindustrian		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Prosentase peningkatan unit usaha industri		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			persentase indikator program yang tercapai		
				BIRO PEREKONOMIAN	
			Prosentase Kegiatan Kehumasan, Keprotokolan dan Kepegawaian		
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan		
				BIRO PEREKONOMIAN	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sumenep		
				DINAS PENDIDIKAN	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			asrama yang tersedia dan mudah diakses bagi lanjut usia terlantar di UPT PSTW Blitar		
				DINAS SOSIAL	
			Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Blitar		
				DINAS SOSIAL	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang memperoleh bimbingan aktifitas hidup sehari-hari di UPT PSTW Blitar		
				DINAS SOSIAL	
			Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar sandangnya di UPT PSTW Blitar		
				DINAS SOSIAL	
			koordinasi dan sinkronisasi bidang rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan di UPT PSTW Blitar		
				DINAS SOSIAL	
			Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti		
				DINAS SOSIAL	
			lanjut usia terlantar di dalam panti yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di UPT PSTW Blitar		
				DINAS SOSIAL	
			lanjut usia terlantar di dalam panti yang menerima alat bantu mobilitas di UPT PSTW Blitar		
				DINAS SOSIAL	
			lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar permakanannya di UPT PSTW Blitar		
				DINAS SOSIAL	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Index Profesional ASN		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
				DINAS PENDIDIKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Kenaikan Pendapatan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase peningkatan pendapatan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Peningkatan Pendapatan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Presentase Peningkatan Pendapatan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase Indikator Program yang tercapai		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase peningkatan Sales Growth		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase realisasi anggaran		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase Realisasi Anggaran		
				DINAS PENDIDIKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka keterserapan lulusan PK-PLK di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Kewirausahaan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Angka keterserapan lulusan SMA di Dunia Usaha/Dunia Industri dan kewirausahaan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Angka keterserapan lulusan SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri dan kewirausahaan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Bangkalan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Banyuwangi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Blitar		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Bojonegoro		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Bondowoso		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Gresik		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Jember		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Jombang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Kabupaten Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Kediri		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Lamongan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Madiun		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Mojokerto		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Nganjuk		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Pacitan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Pamekasan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Pasuruan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Ponorogo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Probolinggo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Sampang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Sidoarjo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Sumenep		
				DINAS PENDIDIKAN	
			APM SMA/Sederajat Wilayah Tulungagung		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia industri dan berwirausaha		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berstandar nasional		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah siswa yang mengikuti lomba		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan kesejahteraan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan perlindungan profesi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Kelulusan Siswa		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 1 Glagah Banyuwangi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 1 Jenangan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 1 Kalipuro Banyuwangi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Kelulusan Siswa SMKN 1 Panji Situbondo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Kelulusan Siswa SMKN 1 Singosari		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Kelulusan Siswa SMKN 1 Surabaya		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 2 Bondowoso		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 2 Pasuruan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 3 Boyolangu		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 3 Buduran		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Kelulusan Siswa SMKN 3 Madiun		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 5 Jember		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase kelulusan siswa SMKN 5 Surabaya		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Kelulusan Siswa SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase keterserapan peserta pelatihan pada dunia usaha/dunia industri dan kewirusahaan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase lembaga yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/sistem		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan layanan kebutuhan profesi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase penyediaan layanan akses di jenjang Pk-PLK		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase penyediaan layanan akses di jenjang PK-PLK		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase penyediaan layanan akses dijenjang SMA		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase penyediaan layanan akses di jenjang SMK		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase sekolah/lembaga yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/sistem dalam proses belajar mengajar		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/sistem dalam proses belajar mengajar		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Kabupaten Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Bangkalan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Banyuwangi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Blitar		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Bojonegoro		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Bondowoso		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani wilayah Gresik		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Gresik		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Jember		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Jombang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Jombang		
				DINAS PENDIDIKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Kabupaten Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Kediri		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Lamongan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Madiun		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani wilayah Mojokerto		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Mojokerto		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Nganjuk		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Pacitan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Pamekasan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Pasuruan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Ponorogo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Probolinggo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Sampang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Sampang		
				DINAS PENDIDIKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Siswa miskin yang terlayani wilayah Sidoarjo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Sumenep		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Siswa miskin yang terlayani Wilayah Tulungagung		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase siswa SLB yang berprestasi dibidang keterampilan, Seni, Olahraga, dan literasi di tingkat Nasional dan Internasional		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase siswa SMA yang berPrestasi dibidang Iptek, Seni, Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase siswa SMK yang berPrestasi dibidang Iptek, Seni, Olahraga, Keterampilan Vokasi di tingkat Nasional dan Internasional		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Presentase kelulusan siswa SMKN 5 Surabaya		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase kelulusan siswa		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase Kelulusan Siswa		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase kelulusan siswa SMKN 11 Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase kelulusan siswa SMKN 1 Buduran Sidoarjo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase kelulusan siswa SMKN 1 Pacitan		
				DINAS PENDIDIKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Prosentase kelulusan siswa SMKN 2 Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase kelulusan siswa SMKN 4 Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase Kelulusan Siswa SMKN 6 Surabaya		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan SPM		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase Peserta yang lulus kompetensi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase Peserta yng lulus kompetensi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/ sistem dalam proses belajar mengajar		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara a usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pamekasan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bangkalan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Banyuwangi		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Blitar		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bojonegoro		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bondowoso		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Gresik		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jember		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jombang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kab. Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kab. Sumenep		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kabupaten Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kediri		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Lamongan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentasewarga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Madiun		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Mojokerto		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Nganjuk		
				DINAS PENDIDIKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pacitan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Ponorogo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Probolinggo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sampang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sidoarjo dan Surabaya		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Tulungagung		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bangkalan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah banyuwangi		
				DINAS PENDIDIKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Blitar		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bojonegoro		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bondowoso		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Gresik		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jember		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jombang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kab Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Malang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kediri		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Lamongan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Mojokerto		
				DINAS PENDIDIKAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Nganjuk		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pacitan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pamekasan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pasuruan		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Ponorogo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Probolinggo		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sampang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sidoarjo dan Surabaya		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sumenep		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Tulungagung		
				DINAS PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS KESEHATAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standard		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase indikator SPM RS yang mencapai target		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Ibu (AKI)		
				DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase kebutuhan sarana prasarana RS yang terpenuhi		
				DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Stunting		
				DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Stunting pada Balita		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dengan tenaga kesehatan memiliki izin praktik		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase alat kesehatan yang diedarkan sesuai persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				DINAS SOSIAL	
			Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana		
				DINAS SOSIAL	
			jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBK Madiun		
				DINAS SOSIAL	
			persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS SOSIAL	
			Presentase indikator program yang tercapai		
				DINAS SOSIAL	
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				DINAS SOSIAL	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			0Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun		
				DINAS SOSIAL	
			Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Magetan		
				DINAS SOSIAL	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBD Pasuruan		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan		
				DINAS SOSIAL	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terlantar yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				DINAS SOSIAL	
			Persentase Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelayanan di dalam LKS		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase realisasi anggaran		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Jumlah pencari kerja yang dilatih UPT BLK Tuban		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase lulusan UPT BLK JOMBANG bersertifikat kompetensi		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase lulusan UPT BLK PASURUAN bersertifikat kompetensi		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase lulusan UPT BLK SUMENEP bersertifikat kompetensi		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase lulusan UPT BLK SURABAYA bersertifikat kompetensi		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di perusahaan		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Prosentase lulusan UPT BLK Bojonegoro Bersertifikasi berkompentensi		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Prosentase lulusan UPT BLK Jember bersertifikat kompetensi		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terlindungi		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK SUMENEP		
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Pelayanan administrasi kepegawaian		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa cepat berkembang		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Produk Unggulan UEM		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			prosentase indikator program tercapai		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Jumlah wirausaha muda pemula		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Persentase efektifitas koordinasi lintas sektor dibidang pelayanan kepemudaan		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Persentase organisasi pemuda yang aktif		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Cakupan pembinaan atlet muda		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Jumlah atlet pelajar dan paralimpik pelajar yang berprestasi tingkat nasional		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Persentase pelatih bersertifikasi		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Pramuka Garuda Provinsi Jawa Timur		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekraf		
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Realisasi Anggaran		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Jumlah Petani yang teredukasi agribisnis		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS KEHUTANAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS KEHUTANAN	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Persentase produktifitas penyuluh kehutanan		
				DINAS KEHUTANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
			Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik		
				DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Presentase Kegiatan Kehumasan, Keprotokolan dan Kepegawaian		
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Presentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur		
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Presentase Alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS		
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Presentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintah Daerah SDM Aparatur		
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Presentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun		
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APM SMA/Sederajat Wilayah Sampang		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Presentase Siswa miskin yang terlayani		
				DINAS PENDIDIKAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Presentase PSKS Penerima manfaat program yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			0Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan		
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan		
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Profesional ASN		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Persentase Peningkatan perpustakaan sesuai dengan standart nasional perpustakaan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standart Nasional Perpustakaan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan penduduk		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS KEHUTANAN	
			persentase realisasi anggaran		
				DINAS KEHUTANAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS KEHUTANAN	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Realisasi Anggaran		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Mata Masyarakat Jawa Timur		
				DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Paru Jember		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan (2022-2024)		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Penataan Bangunan Gedung		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase Pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi (Taba 2022-2024)		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		
				DINAS SOSIAL	
			jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		
				DINAS SOSIAL	
			jasa pelayanan umum kantor		
				DINAS SOSIAL	
			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL	
				pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
				DINAS SOSIAL	
				penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				DINAS SOSIAL	
				penyediaan peralatan rumah tangga	
				DINAS SOSIAL	
				penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				DINAS SOSIAL	
				peralatan dan perlengkapan kantor	
				DINAS SOSIAL	
				Indeks profesionalitas ASN	
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase indikator program yang tercapai	
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase realisasi anggaran	
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Pemeliharaan Aset Dinas	
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Tercapainya paket pengadaan	
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Indeks Profesionalitas ASN	
				DINAS PERHUBUNGAN	
				Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	
				DINAS PERHUBUNGAN	
				Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	
				DINAS PERHUBUNGAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Indikator Program yang tercapai		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT P3 LLAJ Jember		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Jember		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks profesionalitas ASN		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Indeks Profesionalitas ASN		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase realisasi anggaran		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Guna		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan Rencana Zonasi		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase Peningkatan Produksi Garam Rakyat		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah produksi perikanan tangkap		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Jumlah produk olahan UPI yang bersertifikat		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
			Persentase pengusaha air tanah yang taat aturan		
				DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Persentase kegiatan yang berizin		
				DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase penanganan pra bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Persentase pendampingan penanganan pasca bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban bencana alam dan sosial yang tertangani		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang tersusun		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udaranya		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Luas lahan kritis yang dikonservasi/ rehabilitasi (Ha)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			PAD atau Retribusi Daerah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Jumlah Kabupaten/ Kota yang diberikan pembinaan dan pengelolaan KEHATI		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase peserta yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Jumlah pelayanan administrasi		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Prosentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Prosentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Persentase luas areal rehatiitasi		
				DINAS KEHUTANAN	
			Persentase luas areal rehabilitasi		
				DINAS KEHUTANAN	
			Persentase peningkatan bibit tanaman hutan tersertifikasi		
				DINAS KEHUTANAN	
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
			Luas kawasan bernilai ekosistem tinggi		
				DINAS KEHUTANAN	
			Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi		
				DINAS KEHUTANAN	
			Persentase nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Raden Soerjo dengan metode METT		
				DINAS KEHUTANAN	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Indikator Program yang tercapai		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase aparatur damkar dan masyarakat yang terampil dalam pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan pendataan daerah rawan kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL	
			Tersedianya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				DINAS SOSIAL	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				BIRO UMUM	
			Indeks profesionalitas ASN		
				BIRO UMUM	
			Persentase indikator program yang tercapai		
				BIRO UMUM	
			Persentase realisasi anggaran		
				BIRO UMUM	
			Prosentase Kegiatan Kehumasan, Keprotokolanan dan Kepegawaian		
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal AA		
				BIRO ORGANISASI	
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepatuhan terhadap standarisasi pelayanan kategori baik		
				BIRO ORGANISASI	
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang tepat fungsi dan tepat ukuran		
				BIRO ORGANISASI	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks Profesionalitas ASN		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase Realisasi Anggaran		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Indeks profesionalitas ASN		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	
			Indeks Profesionalitas ASN		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	
			Persentase Capaian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	
			Persentase Realisasi Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Jumlah laporan barang milik daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Jumlah ASN yang lulus uji kompetensi		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah capaian kinerja minimal BAIK ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Jumlah Capaian Kinerja Minimal BAIK ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Persentase Database yang Lengkap		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			persentase indikator program yang tercapai		
				BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
			Prosentase indikator program yang tercapai		
				BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
			Prosentase Realisasi Anggaran		
				BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
			Indeks Profesionalitas ASN		
				BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	
			Persentase Indikator Program yang Tercapai		
				BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	
			Persentase Realisasi Anggaran		
				BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
			Hasil SKM/IKM			
				BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
			PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG DITINDAKLANJUTI			
				BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		